

Ketum PAN Zulkifli Hasan Kritik Soal Kebijakan Impor Beras

JAKARTA (IM) - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengkritik kebijakan pemerintah soal kebijakan impor beras.

“Saudara-saudara sekalian yang saya cintai Ramadhan dan Lebaran tahun ini tidak jauh dari waktu panen raya nasional, waktu yang baik seharusnya bisa memberikan keuntungan tersendiri untuk para petani. Tapi sayang di tengah situasi panen raya tersebut ada pihak-pihak yang menghamburkan isu impor beras, membuat harga gabah anjlok dan petani terancam rugi,” kata Zulhas, dalam pidatonya yang ditayangkan di akun YouTube pribadinya, Rabu (14/4).

“Presiden segera merespons isu ini dan memastikan tidak ada impor beras hingga Juni 2021 mendatang. Sebab, stok perdagangan beras nasional yang di Bulog masih aman, tetapi sayang

harga gabah terlanjur berpengaruh akibat isu impor ini harganya menjadi jatuh,” lanjutnya. Zulhas miris melihat kesejahteraan rakyat yang tidak kunjung selesai dengan kebijakan pangan yang carut-marut tersebut. Dia lantas menyinggung kebijakan impor tersebut berasal dari ‘para pemburu rente’ yang hanya menguntungkan pribadi. “Akibatnya, kesejahteraan rakyat menjadi PR Lama yang tidak kunjung usai, kebijakan impor saya kira muncul dari perilaku para pemburu rente yang memaksakan adanya pemburu impor untuk terus langgan di Indonesia, para pemburu rente ini mencari keuntungan sesaat dan rela mengorbankan nasib rakyat kecil, nasib petani, nasib kita di kemudian hari apakah ini buah dari sistem demokrasi yang high cost yang mahal?,” ujarnya. han

IDN/ANTARA



GUBERNUR JATIM KUNJUNGI KORBAN GEMPA DI BLITAR Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (Kanan) memberikan bantuan alat tulis kepada sejumlah anak korban gempa saat berkunjung di salah satu desa terdampak gempa di Desa Tepas Kecamatan Kesamben, Blitar, Jawa Timur, Rabu (14/4). Selain melihat kondisi kerusakan rumah warga di daerah tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga meninjau posko pemulihan psikososial pasca bencana bagi anak-anak korban gempa.

Polhukam

DPR Desak agar Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan

B POM tidak mengeluarkan izin PPUK uji klinis fase kedua untuk vaksin Nusantara karena tidak memenuhi good manufacture practice (GMP). Kenapa dewan ngotot minta uji klinis dilanjutkan?

JAKARTA (IM) - Kendati Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) fase kedua, namun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap mendesak pengembangan vaksin Nusantara dilanjutkan.

persyaratan dari BPOM. Kemudian, desakan agar penelitian vaksin Nusantara dilanjutkan disampaikan sejumlah anggota DPR dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan IV, Selasa (23/3).

Sementara, Kementerian Kesehatan telah menghentikan sementara penelitian vaksin atas permintaan RSUP dr Kariadi untuk melengkapi dokumen

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansofy Siregar mengatakan, pemerintah harus mendukung pengembangan vaksin buatan anak bangsa, yakni vaksin Nusantara dan vaksin Merah Putih. “Mengingat yang pertama,

Presiden RI Bapak Jokowi sudah pernah memanggil Kemenkeu untuk membantu mewujudkan vaksin nusantara atau vaksin produk anak bangsa,” kata Ansofy.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh. Ia mendorong pemerintah mendukung proses pengembangan vaksin Nusantara dan vaksin Merah Putih yang dinilainya mengalami hambatan.

Menurut Nihayatul, pandemi Covid-19 adalah ujian bagi Indonesia agar memiliki kemandirian di sektor kesehatan.

“Oleh sebab itu, saya pribadi mendukung pimpinan DPR untuk segera mengambil sikap DPR RI agar vaksin Nusantara ini segera ditindaklanjuti,” kata Nihayatul.

Bahkan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi IX mempelajari keharusan BPOM untuk mengeluarkan PPUK terkait vaksin Nusantara. Dasco mengatakan, proses uji klinis vaksin Nusantara seharusnya dapat berjalan mulus, seperti jenis vaksin buatan negara lain saat menjalani proses uji klinis di Indonesia.

“Tolong pelajari lagi aturan-nya bahwa memang tidak ada ketentuan, tidak ada keharusan, dan tidak ada aturannya itu BPOM mengeluarkan izin PPUK. Coba dilihat lagi,” ucap Dasco dalam menanggapi interupsi pimpinan Komisi IX.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetyani mengingatkan, pengembangan vaksin Nusantara harus berjalan sesuai dengan standar ilmiah yang berlaku. Ia meminta proses pengembangan vaksin Nusantara tidak buruburu guna menghindari dampak buruk ke depannya.

Akan tetapi, ia juga mengingatkan agar jangan ada persepsi pengembangan vaksin buatan dalam negeri dipersulit. “Jika kita dapat mengembangkan produksi dalam negeri yang lebih bagus dan lebih murah, mengapa tidak didukung?,” kata Netty.

Kepala BPOM Penny Lukito telah mengungkapkan alasan belum mengeluarkan izin PPUK uji klinis fase kedua. Sebab BPOM menemukan kelemahan dalam uji klinis fase I vaksin Nusantara.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada Kamis (8/4) lalu, Penny mengatakan, vaksin Nusantara tidak

memenuhi good manufacture practice (GMP), karena tidak dilakukan validasi dan standarisasi sehingga alat ukurnya tidak terkalibrasi.

Kemudian, konsep vaksin dari sel dendritik juga tidak memenuhi GMP karena dilakukan di tempat terbuka. Padahal, vaksin Covid-19 harus steril karena akan disuntikkan ke tubuh manusia. “Artinya harus ada validasi yang membuktikan produk tersebut sebelum dimasukkan lagi ke subjek, itu steril dan tidak terkontaminasi itu yang ada beberapa tahapan yang tidak dipenuhi,” kata Penny.

Selain itu, Penny menyebut tim peneliti vaksin Nusantara tidak mampu menjelaskan konsep dari vaksin tersebut, apakah seperti terapi atau pelaksanaan vaksinasi pada umumnya.

“Konsepnya sendiri belum valid, data-datanya juga masih belum lengkap untuk bisa menjelaskan konsep dari vaksin yang disebut dengan vaksin nusantara ini,” ujarnya.

Kendati belum mengantongi izin dari BPOM, uji klinis fase II vaksin Nusantara tetap dilanjutkan. Sejumlah anggota Komisi IX DPR dijadwalkan menjadi relawan uji klinis pada Rabu (14/4).

“Bukan hanya sekedar jadi relawan ya, orang kan pasti mempunyai keinginan untuk sehat kan. Kalau untuk massal kan nanti prosesnya di BPOM tapi kalau per orang kan bisa menentukan yang diyakini benar untuk dia,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena saat dihubungi, Selasa (13/4). ● han

Ketum PPP Temui Presiden PKS di Tengah Isu Reshuffle Kabinet

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharto Monarfa menyalami kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu (14/4).

Ahmad Syaikhul menyambut Suharto dan rombongan dari depan pintu masuk. Terlihat Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi juga berada di samping Syaikhul.

Suharto dan rombongannya tiba sekitar pukul 16.55 WIB di DPP PKS, Jl TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan menumpang sebuah bus besar. Setiba di DPP PKS, Suharto terlihat memakai hand sanitizer. Setelah itu, dia masuk ke dalam ruangan disinfektan.

Seuai bersalaman, Syaikhul lantas mengajak Suharto masuk ke ruang pertemuan. Terlihat sejumlah elite PKS dan PPP lainnya telah berada di ruangan tersebut.

Sementara itu, Presiden PKS

Sera, terlihat duduk di salah satu meja bundar yang berada di lobi. Ada pula spanduk panjang bertuliskan ‘Silaturahmi Kebangsaan PKS-PPP’. Di lobi tersebut juga disediakan panggung yang terlihat memuat empat buah kursi.

Pertemuan Syaikhul dan Suharto beserta jajaran berlangsung tertutup. Pertemuan ini sendiri digelar di tengah menguangnya isu reshuffle kabinet.

PPP diketahui merupakan salah satu partai pendukung pemerintah, sementara PKS merupakan partai oposisi. ● han



LAPORAN KEUANGAN PT SUPER ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAK

Kantor Pusat: Ged. Equity Tower Lt.29 Unit E, SCBD LOT.9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan Telp.: (021) 2903 5295 Fax: (021) 2903 5297

Financial statement table for PT SUPER ENERGY TBK and its subsidiaries, showing consolidated financial data from 2020 and 2019, and as of 31 December 2020. Includes categories like ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS, and EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDIK.

Financial statement table for PT SUPER ENERGY TBK and its subsidiaries, showing consolidated financial data from 2020 and 2019, and as of 31 December 2020. Focuses on specific operational metrics and equity details.

Financial statement table for PT SUPER ENERGY TBK and its subsidiaries, showing consolidated financial data from 2020 and 2019, and as of 31 December 2020. Focuses on cash flow and equity distribution to shareholders.

1. Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Super Energy Tbk (Perseroan) dan Entitas Anakannya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan 1 Januari 2019/31 Desember 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawat. Sensi Idris, berdasarkan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualan, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 9 April 2021. Informasi keuangan tersebut di atas tidak mencakup catatan atas laporan keuangan konsolidasian.